

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa pelaku utama dalam sistem perekonomian Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Badan Usaha Milik Swasta (BUMS); dan Koperasi. BUMN sebagai salah satu pelaku utama perekonomian nasional yang bertujuan untuk mendukung keuangan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang keberadaannya pada saat ini diatur dengan Undang-Undang (UU) No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. Berdasarkan UU No.19 Tahun 2003 pasal 2, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah sebagai berikut :

- 1 Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- 2 Mengejar keuntungan;
- 3 Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- 4 Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- 5 Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat;

Menurut Basri (2002:268) mengatakan paling tidak terdapat lima faktor yang melatarbelakangi BUMN, yaitu bahwa BUMN diperlukan untuk :

- 1 Sebagai pelopor atau perintis usaha, dimana swasta tidak tertarik untuk menggelutinya;

- 2 Sebagai pengelola bidang-bidang usaha yang strategis dan pelaksana pelayanan publik;
- 3 Sebagai penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar;
- 4 Sebagai sumber pendapatan negara.

Berdasarkan capaian data ROA dan ROE rill selama tahun 2004 sampai dengan 2007, data menunjukkan bahwa kinerja BUMN yang direncanakan *master plan* BUMN diatas belum tercapai secara efektif (Pratolo, 2007:3). Apabila ditelaah secara literatur, salah satu penyebab belum optimalnya kinerja perusahaan BUMN salah satunya adalah kurangnya perhatian terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance (GCG)* (Tjkager,dkk,2003:166).

Menurut *The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, *Good Corporate Governance (GCG)* adalah suatu gabungan antara hukum, peraturan dan praktek-praktek sektor privat yang cocok, yang memungkinkan perusahaan untuk menarik modal dan sumberdaya manusia beroperasi secara efisien sehingga dapat menjaga kelangsungan operasional dengan menghasilkan nilai ekonomis jangka panjang untuk pemegang sahamnya dan masyarakat secara keseluruhan (Tim BPKP,2003). *Corporate Governance* telah menjadi sebuah isu yang menarik sejak dekade terakhir. Krisis yang terjadi di Indonesia juga tidak terlepas dari keberadaan isu *corporate governance*. Sebenarnya pemerintah telah mencanangkan *good corporate governance (GCG)* sejak lebih dari lima tahun yang lalu. Bahkan di awal 2003, sepuluh BUMN yang menjadi proyek percontohan penerapan *GCG* telah memaklumkan komitmen bersama untuk menerapkan prinsip-prinsip *GCG* tetapi hasilnya proses bisnis yang sedang berlangsung masih sama dengan sebelum pencanangan penerapan *GCG* (Swasembada, 2005).

Mekanisme kunci keberhasilan *good corporate governance* BUMN di Indonesia memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pengendalian intern (Pratolo, 2007:3). Komponen *control environment* atau lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari komponen pengendalian intern lainnya. Lingkungan pengendalian merupakan kondisi obyektif yang ada pada organisasi. Kondisi ini sebagian terbesar ditentukan oleh pimpinan organisasi, dimana lingkungan pengendalian meliputi nilai integritas, etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan pengawas, filosofi manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dan kebijaksanaan dan praktik sumber daya manusia (Arens *et.al*, 2006:274-276). Hal ini pun dipertegas oleh pendapat yang dikeluarkan oleh Effendi (2009:47) mengatakan bahwa keberhasilan maupun kegagalan implementasi konsep *good corporate governance* di BUMN akan tergantung bagaimana sistem pengendalian internal yang diselenggarakan di dalam masing-masing BUMN tersebut. Menurut beliau hal ini dikarenakan sistem pengendalian internal salah satu perwujudan dari *GCG* yang seharusnya dapat diimplementasikan secara konsisten di dalam perusahaan.

Berbicara mengenai pengendalian intern dalam organisasi tidak terlepas dengan pengauditan. Auditing merupakan suatu bidang kegiatan pemeriksaan berkaitan dengan penentuan tentang cara bagaimana peristiwa-peristiwa bisnis harus diukur dan dikomunikasikan. Kegiatan audit merupakan “legitimasi” atas realita ekonomi suatu organisasi bisnis yang tidak dipengaruhi oleh adanya kepentingan-kepentingan kelompok dan perilaku manusia sebagai si pelaku, oleh karena itu untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif diperlukan fungsi audit internal dengan tugas mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian, dan proses pengaturan serta

pengelolaan organisasi (Pratolo, 2007:4). Dalam rangka meninjau ketidakefektifan kinerja BUMN, perlu juga ditinjau aspek ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas operasi BUMN. Untuk melihat sejauh mana perusahaan dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif, diperlukan audit ekonomisasi, efisiensi dan efektivitas operasi manajerial perusahaan yang tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan saja, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja organisasi sektor publik (Arter, 1997:3).

Audit kinerja merupakan salah satu jenis audit yang dilakukan sebagai pengembangan dari audit keuangan. Audit kinerja dimaksudkan untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja suatu lembaga/organisasi khususnya untuk memastikan sesuai atau tidaknya sasaran yang tercapai dengan alokasi anggaran. Audit kinerja (*performance audit*) merupakan perluasan dari audit keuangan yang meliputi audit ekonomi, efisiensi dan efektivitas, maka auditor dalam melakukan audit terlebih dahulu harus memperoleh informasi umum tentang organisasi (Gaffar, 2007:2). Hal ini untuk mendapatkan pemahaman yang memadai tentang lingkungan organisasi yang diaudit, struktur organisasi, proses kerja serta sistem informasi dan pelaporan.

Dengan dilakukannya audit kinerja, perusahaan dapat mengetahui strategi usaha yang dijalankan. Audit kinerja dapat merupakan sinyal awal sehingga apabila ditemukan faktor-faktor yang menjadi kendala kinerja perusahaan dapat dilakukan tindakan seperlunya pada tingkat yang lebih awal. Sementara itu agar pelaksanaan audit dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya, setiap jajaran yang ada dalam perusahaan perlu mengetahui proses audit sehingga tercapainya suatu kinerja yang baik. Apabila audit kinerja ini dilakukan secara baik dan benar maka audit kinerja ini secara potensial dapat menjadi alat evaluasi yang sangat berguna (Arter,1997:5).

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, peneliti termotivasi untuk meneliti bagaimana PERANAN PENGENDALIAN INTERN DAN AUDIT KINERJA DALAM PENCAPAIAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)* PADA PERUSAHAAN BUMN.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, rumusan penelitian ini adalah:

- 1 Apakah terdapat peranan pengendalian intern dalam pencapaian *good corporate governance* pada perusahaan BUMN.
- 2 Apakah terdapat peranan audit kinerja dalam pencapaian *good corporate governance* pada perusahaan BUMN.
- 3 Apakah terdapat peranan pengendalian intern dan audit kinerja secara simultan dalam pencapaian *good corporate governance* BUMN.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah:

- 1 Untuk menguji dan menganalisis bagaimana peranan pengendalian intern dalam pencapaian *good corporate governance* pada perusahaan BUMN.
- 2 Untuk menguji dan menganalisis bagaimana peranan audit kinerja dalam pencapaian *good corporate governance* pada perusahaan BUMN.

- 3 Untuk menguji dan menganalisis bagaimana peranan pengendalian intern dan audit kinerja secara simultan dalam pencapaian *good corporate governance* pada perusahaan BUMN.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis.

Proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana peranan dari pengendalian intern dan audit kinerja di dalam menyukseskan pencapaian *good corporate governance (GCG)* khususnya dalam perusahaan jenis BUMN.

2. Bagi Perusahaan.

Membantu memberikan gambaran tentang pentingnya peran pengendalian intern yang baik di dalam perusahaan dan pelaksanaan audit kinerja di dalam perusahaan untuk mencapai *Good Corporate Governance (GCG)* yang baik sehingga perusahaan dapat merencanakan pengendalian intern dan audit kinerja yang baik di masa yang akan datang.

3. Bagi Akademisi.

Hasil penelitian ini menambah wawasan maupun referensi bagi pihak akademisi khususnya pada bidang auditing dalam hal ini bagaimana pentingnya audit dalam menunjang pencapaian *GCG* dalam suatu perusahaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN PENGEMBANGAN

HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Pengendalian Intern

2.1.1.1. Pengertian Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan salah satu alat bagi manajemen untuk mengawasi jalannya perusahaan agar operasinya dapat berjalan dengan lancar, aset perusahaan dapat terjamin keamanannya dan dapat mencegah terjadinya kecurangan, kesalahan dan pemborosan. Suatu pengendalian intern yang memadai merupakan kunci kesuksesan dan efektifnya suatu manajemen perusahaan. Pengendalian intern sangat diperlukan untuk meminimalkan penyimpangan atau penyelewengan yang dapat terjadi di dalam suatu perusahaan.

Menurut AICPA dalam Midjan (2001:58) mengungkapkan pengertian dari sistem pengendalian intern, yaitu :

“Meliputi struktur organisasi dan segala cara serta tindakan dalam suatu perusahaan yang saling terkoordinasi dengan tujuan untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan, menguji ketelitian dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi dari suatu perusahaan serta mendorong ketaatan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh pimpinan perusahaan.”

Menurut Cangemi dan Singleton (2003:65), pengendalian intern didefinisikan sebagai berikut:

Internal control is a process, affected by an entity's boards of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories :

- *Effectiveness and efficiency of operations*
- *Reliability of financial reporting*
- *Compliance with applicable laws and regulations.*

Definisi tentang pengendalian intern diatas memperjelas bahwa pengendalian intern bukan hanya mempengaruhi laporan keuangan yang *reliable* saja tetapi juga menunjukkan bahwa pengendalian seharusnya efektif untuk semua operasi. Hal ini dipertegas oleh *Institute of Internal Auditors (IIA)* di dalam *Standard and Guideline for The Profesional Practice of Internal Auditing* yang dikutip oleh Cangemi dan Singleton (2003: 65) yang menyatakan bahwa pengendalian intern adalah aktivitas yang berusaha untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan utama dari pengendalian intern adalah tercapainya :

- Reliabilitas dan integritas informasi.
- Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan kebijakan.
- Pengamanan asset.
- Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien.
- Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk operasi dan program.

2.1.1.2. Prinsip Dasar Sistem Pengendalian Intern

Prinsip-prinsip dasar yang menunjang terlaksananya sistem pengendalian intern yang baik dimana sistem harus memiliki lima prinsip dasar (Midjan,2001: 60-63) adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh manajemen puncak, direktur dan komisaris dan pemilik suatu satuan usaha entitas ekonomi terhadap pengendalian dan pentingnya terhadap satuan usaha tersebut.

2. Penetapan Risiko oleh Manajemen

Merupakan identifikasi dan analisis oleh manajemen atas resiko-resiko yang relevan terhadap penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PABU. Manajemen menetapkan risiko sebagai bagian dari perancangan dan pengoperasian SPI untuk meminimalkan salah saji dan ketidakberesan.

3. Sistem Komunikasi dan Informasi Akuntansi.

Kegunaan sistem akuntansi satu satuan usaha adalah untuk mengidentifikasi, menggabungkan, mengklasifikasi, menganalisa, mencatat, dan melaporkan transaksi satu satuan usaha dan untuk mengelola akuntabilitas atas aktiva terkait

4. Aktifitas Pengendalian

Merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat manajemen untuk memenuhi tujuannya. Lima kategori kebijakan dan prosedur yang biasanya digunakan oleh satu satuan usaha yaitu :

- Pemisahan tugas yang cukup

- Otorisasi yang pantas terhadap suatu aktivitas dan transaksi perusahaan.
- Dokumen dan catatan yang memadai.
- Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan.
- Pengecekan independen atas pelaksanaan.

5. **Pemantauan.**

Aktifitas ini berkaitan dengan penilaian efektifitas rancangan dan operasi SPI secara periodik dan terus menerus oleh manajemen untuk melihat apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan.

2.1.2. **Audit Kinerja**

2.1.2.1. **Pengertian Kinerja**

Kinerja (*performance*) merupakan suatu pola tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diukur berdasarkan standar yang ditetapkan. Bastian (2001: 128) menyatakan kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi suatu organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan suatu prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat diukur. Pengukuran ini tidak semata-mata pada masukan (output) atau manfaat program tersebut (Gaffar, 2007: 1062).

Stoener dan Freeman (1992:6) mendefinisikan kinerja, baik kinerja organisasional maupun kinerja manajerial adalah sebagai berikut:

“Organizational performance is the measure of how well organization do their jobs. Managerial performance is the measure of how efficient and effective a manageris, how wel she or determine and achieves appropriate objectives”.

Kalber dan Forgaty (1995:24) memberikan definisi kinerja sebagai evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan melewati atasan langsung, teman, dirinya sendiri dan bawahan. Mulyadi (2001:69) mengatakan kinerja merupakan penentuan efektivitas operasional pada suatu waktu tertentu dalam organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan pengertian kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi yang dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil.

2.1.2.2. Pengertian Audit Kinerja

Audit kinerja (*performance audit*) lahir di Inggris pada tahun 1932 (Batra, 1997:49). Audit kinerja merupakan perkembangan dari audit keuangan, audit operasional dan konsultasi manajemen. Audit kinerja (*performance audit*) merupakan evaluasi secara independen dan berorientasi ke masa depan atas berbagai kegiatan operasional suatu organisasi guna membantu manajemen di dalam meningkatkan efektivitas pencapaian hasil dan tujuan yang ditetapkan (Gaffar, 2007:1063).

Strawser (2001:4) mengungkapkan definisi audit kinerja sebagai berikut :

“Is planning for obtaining and evaluating sufficient, relevant, material, and competent evidence by an independent auditor on the audit objective of whether an entity’s management, employees, or delegated agents have or hve not accepted and carried out appropriate laws, regulations, policies, procedures, or other management standards for properly using its resources in an efficient and economical manner. From this evidence on the audit objective, the auditor comes to an opinion or conclusion and reports to a third party with sufficient evidence in the report to convince the third party that the conclusions is accurate, and with a recommendation for the possible correction of any deficiencies”.

Burrowes dan Perrson (2000:89) mengungkapkan definisi audit kinerja sebagai berikut:

“Performance Audit can be defined as an evaluation of management and the organization’s functioning and performance with respect to economy, efficiency and effectiveness of operating areas, activities and results”.

Menurut Siagian (2001:44) audit kinerja merupakan bentuk pemeriksaan yang bertujuan untuk meneliti dan menilai kinerja perusahaan yang dilihat dari sudut pandang peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja dalam berbagai kompetensi.

Sawyers,*et.al* (2003:35)mendefinisikan audit kinerja sebagai berikut :

”is the comprehensive review of the varied functions within an enterprise to appraise the efficiency and economy of operations and the effectiveness with those functions achieve their objectives”.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa konsep audit kinerja pada intinya memiliki tiga dimensi yaitu evaluasi ekonomisasi, evaluasi efisiensi, dan evaluasi efektivitas.

2.1.2.3. Prinsip-Prinsip Konsep Audit Kinerja

Audit kinerja (*performance audit*) merupakan proses yang sistematis yang memiliki pilar-pilar yang mendasarinya yang terdiri dari :

1. **Ekonomisasi.**

Secara singkat pengertian ekonomis (kehematan) dapat dipahami sebagai perbandingan tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan proyek dengan manfaat yang akan diperoleh proyek tersebut. Atau dapat dikatakan suatu aktivitas dinilai ekonomis jika dengan tingkat biaya yang minimal kegiatan tsb dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan tanpa mengorbankan hasil yang dicapai dengan syarat bahwa biaya tersebut adalah alternatif yang terbaik dari beberapa kemungkinan yang telah diperbandingkan.

2. **Evaluasi Efisiensi.**

Efisiensi atau berdaya guna adalah suatu tingkat penggunaan biaya untuk melaksanakan suatu aktivitas atau untuk memperoleh sesuatu.

3. **Evaluasi Efektifan.**

Efektivitas atau hasil guna dapat diartikan sebagai keberhasilan suatu organisasi dalam usahanya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi tersebut. Untuk menentukan apakah suatu aktivitas telah dilaksanakan secara efektif penilaiannya didasarkan atas tiga faktor penting yaitu:

- Output yang dihasilkan.
- Rancangan program alternatif.
- Tujuan alternatif yang merupakan kemungkinan target/sasaran pelaksanaan kegiatan dan apakah bobot dan prioritasnya tepat.

2.1.2.4. Manfaat Audit Kinerja

Audit kinerja dalam pelaksanaannya dapat mengidentifikasi berbagai masalah yang menuntut adanya pemeriksaan lebih rinci (Gaffar, 2007:1068):

- Penggunaan standar atau penetapan penjabaran tujuan oleh manajemen dalam pengukuran hasil kerja, produktivitas, efisiensi atau penggunaan barang/jasa yang kurang tepat;
- Tiadanya kejelasan prosedur tertulis atau prosedur yang berbelit-belit sehingga dapat ditafsirkan salah atau tidak konsisten dan menambah pelayanan menjadi terlalu lama;
- Personil yang kurang cakap sehingga menimbulkan kelambatan dan kekurangan lainnya termasuk kegagalan menerima tanggung jawab yang benar;
- Dana dipakai tidak tepat atau tidak hat-hati;
- Pola pembiayaan mewah atau berlebihan yang sebenarnya tidak perlu.

Masalah-masalah diatas dapat diuji dan dianalisis serta dicari jalan keluarnya agar di masa yang akan datang kondisinya dapat lebih baik. Dengan demikian manfaat audit kinerja seperti yang dinyatakan oleh Gaffar (2007:1069):

- Kewaspadaan dan kebijakan yang tepat dalam penggunaan sumber daya dengan selalu membandingkan berbagai alternatif biaya dengan manfaatnya;
- Kesadaran biaya para pejabat eksekutif yang cukup tinggi dalam penggunaan dana perusahaan;
- Kesadaran biaya para pejabat dalam melaksanakan berbagai pekerjaan/prosedur;
- Perencanaan akan semakin baik dengan terarah dan terpadu;
- Para pegawai akan semakin kompeten, rajin dan disiplin;

- Prosedur akan semakin sederhana dan efisien, tetapi aman, sehingga pelaksanaan lancar;
- Supervisi kinerja para pejabat akan semakin efektif;
- Ketidakkompetenan, ketidakberesan, pemborosan, ketidakefisienan dan kecurangan akan mudah terdeteksi.

2.1.3. *Good Corporate Governance*

2.1.3.1. *Pengertian Good Corporate Governance (GCG)*

Mencuatnya skandal keuangan yang melibatkan perusahaan besar seperti Enron, Worldcom, Tyco, Global Crossing dan yang terakhir AOL-Warner menuntut peningkatan kualitas good corporate governance (Soegiharto, 2005:38). Terminology *good corporate governance* telah dikenal dari Amerika Serikat pasca krisis ekonomi Amerika sekitar tahun 1930.

Menurut World Bank dalam Nogi (2003:11) *good corporate governance* yaitu:

“Kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan”.

Frasa *corporate governance* terdiri dari dua kata, yaitu *corporate* dan *governance*. Kata *corporate* merupakan sifat (*adjective*) yang bermakna “berbagai sifat yang berkaitan dengan korporasi atau perusahaan”. Kata *governance* merupakan kata benda (*noun*) yang bermakna “pengelolaan”. Di Indonesia sebagian literatur menerjemahkan *corporate governance* sebagai tata kelola dan sebagian lainnya menyebutkan tata pamong (Sony *et.al*, 2009:3).

Istilah *good corporate governance* secara luas telah dikenal dalam dunia usaha. Ada beberapa pengertian *good corporate governance* yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) *Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporate, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholders and spells out the rules and procedure for making decisions on corporate affairs.* (OECD dalam Siswanto dan Aldrige, 2005:2).
- b) (1) Hubungan antara perusahaan dengan pihak-pihak terkait yang terdiri atas pemegang saham, karyawan, kreditur, pesaing, pelanggan, dan lain-lain. (2) Mekanisme pengecekan dan pemantauan perilaku manajemen puncak (Hitara, 2003:1 dalam Majidah, 2004:64).
- c) Burns dalam Carpenter (2004:8) mendefinisikan *corporate governance* sebagai:” *a hefty sounding phrases that really just means oversight of company management-making sure the business is run well and inventors are treated fairly*”.
- d) Ruin (2003:19) menyatakan bahwa *good corporate governance* sebagai berikut:
“From some of the best practice guidelines that any one can come across globally, corporate governance is all about how an organizations is managed; organizes its corporate and other structures; develops its culture; its policies and strategie; and deals with it various stekeholders”.

2.1.3.2. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Dalam konteks tumbuhnya kesadaran akan arti penting *corporate governance* ini, *Organization for Economic Corporation and Development (OECD)* telah mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip GCG dan dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan keadaan, kebudayaan, dan tradisi masing-masing negara. Di Indonesia, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menetapkan prinsip-prinsip yang diharapkan perusahaan menerapkannya di setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. KNKG menyebut prinsip *corporate governance* sebagai asas *corporate governance*. Berikut ini lima asas yang tercantum pada Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (PU-GCG) menurut KNKG (2006):

1) Transparansi.

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-perundangan tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2) Akuntabilitas.

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3) **Resposibilitas.**

Perusahaan harus memiliki peraturan perundangan-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai good corporate citizen.

4) **Independensi.**

Perusahaan harus dikelola secara independensi sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain.

5) **Kewajaran.**

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas kewajaran dan kesetaraan.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan Keputusan Menteri (KEPMEN) dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meliputi:

1) Transparansi.

Keputusan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

2) Kemandirian.

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3) Akuntabilitas.

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

4) Pertanggungjawaban.

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

5) Kewajaran.

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sony *et.al*,2009:10)

2.1.3.3. Manfaat Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Esensi *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap shareholders dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Untuk meningkatkan akuntabilitas di dalam perusahaan maka selain diperlukannya auditor, komite audit serta remunerasi eksekutif, *good corporate governance* memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga terciptanya mekanisme *check and balance* di perusahaan. (Gunarsih, 2003:65).

Adapun manfaat yang diperoleh dengan menerapkan *good corporate governance* yang baik di dalam suatu perusahaan adalah (Gunarsih, 2003:66) :

- Menurunkan risiko.

Dengan menerapkan *GCG* maka perusahaan akan dapat meminimalkan praktek-praktek KKN yang terjadi di perusahaan. Praktek-praktek yang tidak sehat tersebut jika dibiarkan akan menyebabkan resiko-resiko kerugian perusahaan bahkan kebangkrutan.

- Meningkatkan nilai saham.

Diterapkannya *GCG* merupakan indikator perusahaan yang telah dikelola dengan baik dan transparan sehingga merupakan hal yang sangat penting bagi kepercayaan investor/publik terhadap perusahaan. Dengan meningkatnya kepercayaan akan menjadikan nilai sahamnya banyak diminati di bursa sehingga akan berdampak positif terhadap kenaikan nilai saham.

- Menjamin kepatuhan.

Setiap peraturan yang terkait dengan struktur dan operasi perusahaan ditunjukkan untuk mengatur aktivitas dan hubungan yang saling menguntungkan antar pihak yang terkait. Keseimbangan antar stakeholders mengarahkan perusahaan pada kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ditetapkan.

- Memiliki daya tahan.

Dengan menerapkan *GCG*, perusahaan akan lebih memiliki daya tahan terhadap pengaruh buruk kondisi dunia usaha dan perilaku dunia usaha sekitarnya.

- Memacu kinerja.

Melalui mekanisme supervisi kinerja manajemen dan mempertegas pertanggungjawaban komisaris dan direksi kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya akan memacu jajaran komisaris dan direksi meningkatkan kinerja perusahaan.

- Meningkatkan akuntabilitas publik.

GCG mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan seluruh stakeholders dan hal ini diwujudkan dalam bentuk pengungkapan informasi atas kondisi perusahaan baik dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan lainnya sehingga hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan akuntabilitas publik.

- Membantu penerimaan negara.

Dengan transparansi dan dipatuhinya peraturan perpajakan akan berdampak pada penerimaan negara yang meningkat. Khususnya bagi BUMN/BUMD dengan kinerja yang prima akan meningkatkan laba operasi dan nilai saham yang tinggi sehingga akan meningkatkan bagian laba pemerintah. Jika setiap perusahaan semakin banyak menerapkan *GCG* dengan baik maka akan semakin cepat pemulihan ekonomi yang akan dapat dirasakan seluruh masyarakat nasional.

2.1.4. Peranan Pengendalian Intern dan Audit Kinerja Terhadap Pencapaian *Good Corporate Governance*.

Perusahaan BUMN merupakan lembaga ekonomi yang didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak (UU No.19 Tahun 2003 Pasal 2). Hal tersebut mencerminkan bahwa di dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan akan berinteraksi secara kelembagaan dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perusahaannya tersebut. Dalam interaksi tersebut terdapat berbagai macam kepentingan yang mungkin dan seringkali tidak sejalan dengan kepentingan pokok pemegang saham, diantaranya kepentingan yang dimiliki oleh

karyawan, pemasok, pelanggan, distributor, pemerintah, pesaing serta masyarakat yang ikut memberikan kontribusi terhadap keberhasilan perusahaan dan yang ikut pula menanggung dampak dari kegiatan operasional perusahaan.

Untuk mencapai tujuan BUMN secara maksimal maka perusahaan harus dikelola dengan baik, efektif dan efisien. Pengelolaan perusahaan dengan baik pada arti yang luas diistilahkan dengan konsep *good corporate governance*. *Corporate governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan. *GCG* merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang sekaligus memenangkan persaingan bisnis global.

Agar dapat mewujudkan *good corporate governance* yang baik harus dilakukan melalui suatu proses transformasi internal organisasi yang memfokuskan pergeseran secara fundamental pada *people management*, nilai-nilai, pola kerja, budaya organisasi, dan pola pikir. Selain itu juga perlu adanya perubahan pada sistem di dalam aspek-aspek pendukungnya. Pembangunan pada aspek sistem pada perusahaan antara lain ditempuh dengan pembangunan pengendalian intern yang baik di dalam perusahaan dan audit kinerja yang handal.

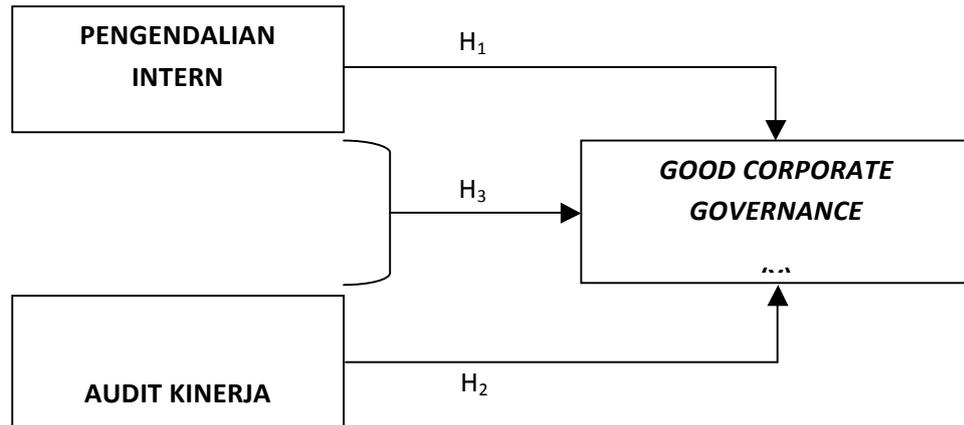
Sistem pengendalian internal merupakan salah satu perwujudan dari *GCG* yang seharusnya dapat diimplementasikan secara konsisten di dalam perusahaan karena dengan menerapkan *GCG* diperlukan keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban perusahaan dengan pihak luar. Untuk menjamin kelangsungan eksistensi dan

pertanggungjawaban perusahaan dengan pihak luar tersebut diperlukannya peran pengendalian internal yang merupakan alat bagi manajemen untuk mengawasi jalannya perusahaan agar operasi perusahaan berjalan dengan lancar, aktiva perusahaan dapat terjamin keamanannya dan dapat mencegah kecurangan, kesalahan dan pemborosan.

Good corporate governance juga merupakan seperangkat prinsip, kebijakan dan sistem manajemen perusahaan yang diterapkan bagi terwujudnya operasional perusahaan yang efisien, efektif dan ekonomis serta *portable* dalam menjalankan organisasi dan bisnis perusahaan. Untuk terwujudnya operasional yang efektif, efisien dan ekonomis maka perusahaan juga memerlukan peran audit kinerja di dalam pencapaian *good corporate governance* yang baik. Audit kinerja merupakan salah satu jenis audit yang dilakukan sebagai pengembangan dari audit keuangan. Audit kinerja dimaksudkan untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja suatu lembaga/organisasi/perusahaan, khususnya untuk memastikan sesuai atau tidaknya sasaran yang tercapai dengan alokasi anggaran. Audit kinerja merupakan perluasan dari audit keuangan yang meliputi audit ekonomi, efisiensi dan efektivitas, maka auditor dalam melakukan audit terlebih dahulu harus memperoleh informasi umum tentang organisasi. Apabila dilakukan secara baik dan benar, audit kinerja secara potensial menjadi alat evaluasi yang sangat berguna. (Arter, 1997:3).

2.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan peneliti merumuskan paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1
Model Penelitian

2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis I : Pengendalian Intern berperan secara positif dalam pencapaian *good corporate governance* pada perusahaan BUMN

Hipotesis II : Audit Kinerja berperan secara positif dalam pencapaian *good corporate governance* pada perusahaan BUMN

Hipotesis III : Pengendalian Intern dan audit kinerja berperan secara positif dalam pencapaian *good corporate governance* pada perusahaan BUMN

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian pada studi ini adalah empat perusahaan BUMN di Bandung yang bergerak dalam bidang elektronik yaitu **PT. Lembaga Elektronik Negara (LEN); PT. ELTRAN Indonesia; PT. Surya Energi Indotama (SEI); PT.LEN RAILWAY SYSTEMS**. *Unit of analysis* dalam studi ini adalah individu, yaitu bagian Satuan Pengendalian Intern (SPI), auditor internal dan perwakilan dari beberapa karyawan dari bagian (keuangan dan akuntansi, pemasaran, dan produksi). Jumlah responden yang akan diteliti pada penelitian ini total \pm 130 responden.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Metoda pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *survey*, yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Teknik *survey* digunakan sebagai langkah pencarian data primer. Kuesioner yaitu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang disusun untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari beberapa orang (Mudrajad, 2003:127). Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yaitu seperangkat daftar pertanyaan atau pernyataan dengan kemungkinan jawaban yang telah disediakan, responden hanya memilih salah satu dari lima alternatif jawaban. Kuesioner terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berkaitan dengan identitas responden. Bagian kedua berkaitan dengan butir-butir pernyataan mengenai variabel-variabel yang akan diteliti.

Data kepustakaan diperoleh melalui buku, artikel-artikel, data-data yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti, serta teori-teori yang terkait dengan topik penelitian.

3.3. Definisi Operasional dan Skala Pengukuran

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran

VARIABEL	INDIKATOR	SUB VARIABEL	SKALA	INSTRUMEN
Sistem Pengendalian Intern (X ₁)	Lingkungan Pengendalian	Tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, harmonis dan pemilik satu entitas mengenai pengendalian dan arti pentingnya	Likert	Kuesioner
	Penilaian Risiko	Identifikasi dan analisis oleh manajemen atas risiko yang relevan terhadap penyiapan laporan keuangan agar sesuai dengan PABU		
	Sistem Komunikasi dan Informasi Akuntansi	Metode yang dipakai mengidentifikasi, menggabungkan, mengklarifikasikan, mencatat dan melaporkan transaksi satu entitas untuk menjamin akuntabilitas untuk aktiva yg terkait.		
	Aktivitas Pengendalian	Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen untuk memenuhi tujuannya untuk pelaporan keuangan.		
	Pemantauan	Penilaian efektivitas rancangan operasi SPI secara periodik dan terus menerus oleh manajemen untuk melihat apakah manajemen telah dilaksanakan dengan		

		semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan.		
Audit Kinerja (X ₂)	<p>Nilai Ekonomis</p> <p>Nilai Efisiensi</p> <p>Nilai Efektifitas</p>	<p>Pemberian nilai ekonomis terhadap suatu aktivitas proyek data yang dibutuhkan adalah keterangan-keterangan yang berhubungan dengan pencatatan, prosedur laporan, menentukan kebenaran dan pengeluaran yaitu biaya yang merupakan pengeluaran uang yang menjadi beban organisasi</p> <p>Suatu aktivitas dinilai ekonomis jika dengan tingkat biaya yang minimal kegiatan itu dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan tanpa mengorbankan hasil yang dicapai</p> <p>Penggunaan biaya untuk melaksanakan suatu aktivitas atau untuk memperoleh sesuatu.</p> <p>Keberhasilan suatu organisasi dalam usahanya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi tersebut.</p>	Likert	Kuesioner
<i>Good Corporate Governance</i> (Y)	<p>Transparansi</p> <p>Kemandirian</p> <p>Akuntabilitas</p> <p>Pertanggung jawaban</p> <p>Kewajaran</p>	<p>Transparansi dalam proses pengambilan keputusan.</p> <p>Kemandirian dalam mengelola perusahaan tanpa berbenturan dan tekanan dengan pihak lain.</p> <p>Akuntabilitas dalam menjalankan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban</p> <p>Pengelolaan perusahaan sesuai dengan UU /peraturan yg berlaku</p> <p>Kewajaran di dalam memenuhi hak-hak stakeholders</p>	Likert	Kuesioner

3.4. Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini mencerminkan tingkat keandalan dan validitas tinggi. Untuk menguji tingkat validitas, peneliti melakukan *construct validity*. Pengujian validitas dilakukan melalui faktor analisis dengan menggunakan *factor loading*. Pengukuran faktor analisis selanjutnya dilakukan dengan menggunakan bantuan *software* SPSS 11.5 for Windows. Indikator masing-masing konstruk yang memiliki *factor loading* yang signifikan membuktikan bahwa indikator-indikator tersebut merupakan satu kesatuan alat ukur yang mengukur konstruk yang sama dan dapat memprediksi dengan baik konstruk yang seharusnya diprediksi (Hair *et al.*, 1998). Kriteria terhadap signifikansi *factor loading* adalah *factor loading* > 0,3 adalah signifikan, *factor loading* > 0,4 lebih signifikan, dan *factor loading* yang > 0,5 adalah sangat signifikan.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi terhadap instrumen-instrumen yang mengukur konsep dan membantu untuk mengetahui kebaikan alat ukur (Sekaran, 2000). Konsistensi internal butir-butir pernyataan dalam kuesioner akan diuji dengan menggunakan *Cronbach's Alpha*. Nilai *rule of thumb* yang akan digunakan dalam *Cronbach's Alpha* adalah harus lebih besar dari 0,7, meskipun nilai 0,6 juga masih dapat diterima (Hair *et al.*, 1998). *Item to total correlation* digunakan untuk memperbaiki pengukuran dan mengeliminasi butir-butir yang kehadirannya akan memperkecil *Cronbach's Alpha* (Purwanto, 2002, dalam Tjahyadi, 2007). Secara umum, nilai *item to total correlation* ≥ 5 dapat diterima (Hair *et al.*, 1998). Nilai *item to total correlation* < 5

tetap dapat diterima, jika eliminasi butir-butir yang memiliki *item to total correlation* < 5 akan menghasilkan koefisien *Cronbach Alpha* yang lebih kecil (Purwanto, 2002, dalam Tjahyadi, 2007).

3.5. Metode Analisis Data

Metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Metode ini mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan dari persamaan yang bersifat linier yang melibatkan dua variabel bebas atau lebih sebagai alat prediksi besarnya variabel terikat (Rochaety *et.al*, 2007:131). Sesuai dengan hipotesis yang diuji dalam penelitian ini maka persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y adalah *Good Corporate Governance*

β_0 adalah koefisien intercept (konstanta) yaitu nilai Y jika nilai seluruh variabel lain adalah nol.

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ adalah koefisien regresi

X_1 adalah sistem pengendalian intern

X_2 adalah audit kinerja

ε adalah error

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang mendasari penggunaan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda merupakan alat analisis yang termasuk statistik parametrik. Sebagai alat statistik parametrik, analisis regresi membutuhkan asumsi yang perlu dipenuhi sebelum

dilakukannya pegujian/ analisis. Analisis ini dinamakan dengan uji asumsi klasik (Gujarati, 2003:339).

Uji asumsi klasik yang mendasari dalam penggunaan regresi mencakup :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kolmogorov Smirnov Test* dan untuk menguji kenormalan *disturbance error* (variabel gangguan) digunakan pendekatan Grafik Program SPSS yaitu *normal probability plot* yang mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusannya yaitu:

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi variabel-variabel bebas antara yang satu dengan yang lainnya. Ada tidaknya terjadi multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factors* (VIF). Nilai cutoff yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai $\text{tolerance} < 0.10$ atau sama dengan nilai $\text{VIF} > 10$.

3.6. Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hipotesis penelitian yang ditujukan, maka dapat dirumuskan hipotesis statistiknya sebagai berikut:

Hipotesis Pertama

$H_{01} : \beta_1 = 0$ Pengendalian Intern tidak berperan secara positif dalam pencapaian *good corporate governance* pada perusahaan BUMN.

$H_{a1} : \beta_1 \neq 0$ Pengendalian Intern berperan secara positif dalam pencapaian *good corporate governance* pada perusahaan BUMN.

Hipotesis Kedua

$H_{02} : \beta_2 = 0$ Audit Kinerja tidak berperan secara positif dalam pencapaian *good corporate governance* pada perusahaan BUMN.

$H_{a2} : \beta_2 \neq 0$ Audit Kinerja berperan secara positif dalam pencapaian *good corporate governance* pada perusahaan BUMN.

Hipotesis Ketiga

$H_{03} : \beta_3 = 0$ Pengendalian Intern dan audit kinerja tidak berperan secara positif dalam pencapaian *good corporate governance* pada perusahaan BUMN

$H_{a3} : \beta_3 \neq 0$ Pengendalian Intern dan audit kinerja berperan secara positif dalam pencapaian *good corporate governance* pada perusahaan.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan analisis hasil penelitian mengenai variabel-variabel yang diuji. Analisis dimulai dengan penjelasan mengenai analisis deskriptif data penelitian, pengujian instrumen (validitas dan reliabilitas), dan pengujian hipotesis dan pembahasan.

4.1. Data

Jumlah kuesioner pada penelitian ini sebanyak 130 kuesioner. Jumlah tersebut layak untuk diuji karena telah memenuhi ukuran minimum sampel yang dianjurkan, yaitu sebanyak 100 sampel atau minimum melampaui lima kali jumlah parameter yang diestimasi.

4.2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei, yaitu menggunakan kuesioner yang berisi butir-butir pengukur konstruk yang digunakan pada penelitian ini. Teknik penyebaran dan pengumpulan data dilakukan pada Oktober 2012. Jumlah kuesioner yang terkumpul adalah 92 kuesioner dari 130 kuesioner yang direncanakan sedangkan 38 kuesioner tidak layak dikarenakan pengisian kuesioner yang tidak lengkap dan kuesioner yang tidak kembali.

4.3. Analisis Deskriptif Data Penelitian

4.3.1. Variabel Sistem Pengendalian Internal

4.3.1.1. Terdapatnya tindakan,kebijakan dan prosedur yang baik dari manajemen puncak, direktur maupun komisaris terhadap pengendalian intern yang ada di dalam perusahaan (SPI1).

Hasil tanggapan responden untuk butir kuesioner variabel Sistem Pengendalian Intern dengan indikator lingkungan pengendalian ditunjukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel 4.1
Pernyataan Sistem Pengendalian Internal 1

SPI1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	18	19,6	19,6	19,6
4	44	47,8	47,8	67,4
5	30	32,6	32,6	100,0
Total	92	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Dari tabel 4.1 diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebesar 19,6 % responden ragu-ragu mengenai terdapatnya tindakan,kebijakan dan prosedur yang baik dari manajemen puncak, direktur maupun komisaris terhadap pengendalian intern yang ada di dalam perusahaan; 47,8 % responden menyatakan setuju terdapatnya tindakan,kebijakan dan prosedur yang baik dari manajemen puncak, direktur maupun komisaris terhadap pengendalian intern yang ada di dalam perusahaan dan sebanyak 32,6 % responden menyatakan sangat setuju terdapatnya tindakan,kebijakan dan prosedur yang baik dari manajemen puncak, direktur maupun komisaris terhadap pengendalian intern yang ada di dalam perusahaan

4.3.1.2. Manajemen menetapkan risiko sebagai bagian dari perancangan dan pengoperasian SPI untuk meminimalkan salah saji dan ketidakberesan (SPI2).

Hasil tanggapan responden untuk butir kuesioner variabel Sistem Pengendalian Intern dengan indikator penilaian risiko ditunjukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel 4.2
Pernyataan Sistem Pengendalian Internal 2
SPI2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	15	16,3	16,3	16,3
4	43	46,7	46,7	63,0
5	34	37,0	37,0	100,0
Total	92	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Dari tabel 4.2 diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebesar 16,3 % responden ragu-ragu mengenai adanya penetapan risiko oleh manajemen sebagai bagian dari perancangan dan pengoperasian SPI untuk meminimalkan salah saji dan ketidakberesan di dalam perusahaan; 46,7 % responden menyatakan setuju adanya penetapan risiko oleh manajemen sebagai bagian dari perancangan dan pengoperasian SPI untuk meminimalkan salah saji dan ketidakberesan di dalam perusahaan; dan sebanyak 37 % responden menyatakan sangat setuju adanya penetapan risiko oleh manajemen sebagai bagian dari perancangan dan pengoperasian SPI untuk meminimalkan salah saji dan ketidakberesan di dalam perusahaan.

4.3.1.3. Sistem akuntansi yang ada di dalam perusahaan telah dapat mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisa, mencatat dan melaporkan setiap transaksi yang terjadi dengan baik (SPI3).

Hasil tanggapan responden untuk butir kuesioner variabel Sistem Pengendalian Intern dengan indikator sistem komunikasi dan informasi akuntansi ditunjukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel 4.3
Pernyataan Sistem Pengendalian Internal 3
SPI3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	14	15,2	15,2	15,2
4	47	51,1	51,1	66,3
5	31	33,7	33,7	100,0
Total	92	100,0	100,0	

Sumber: Hasila Olahan SPSS

Dari tabel 4.3 diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebesar 15,2 % responden ragu-ragu sistem akuntansi yang ada di dalam perusahaan telah dapat mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisa, mencatat dan melaporkan setiap transaksi yang terjadi dengan baik; 51,1% responden menyatakan setuju sistem akuntansi yang ada di dalam perusahaan telah dapat mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisa, mencatat dan melaporkan setiap transaksi yang terjadi dengan baik; dan sebanyak 33,7 % responden menyatakan sangat setuju sistem akuntansi yang ada di dalam perusahaan telah dapat mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisa, mencatat dan melaporkan setiap transaksi yang terjadi dengan baik.

4.3.1.4. Terdapatnya kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen untuk memenuhi tujuan laporan keuangan di dalam perusahaan (SPI4).

Hasil tanggapan responden untuk butir kuesioner variabel Sistem Pengendalian Intern dengan indikator aktivitas pengendalian ditunjukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel 4.4
Pernyataan Sistem Pengendalian Internal 4
SPI4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	18	19,6	19,6	19,6
4	38	41,3	41,3	60,9
5	36	39,1	39,1	100,0
Total	92	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Dari tabel 4.4 diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebesar 19,6 % responden ragu-ragu bahwa terdapat suatu kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen untuk memenuhi tujuan laporan keuangan di dalam perusahaan; 41,3 % responden menyatakan setuju terdapat suatu kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen untuk memenuhi tujuan laporan keuangan di dalam perusahaan; dan sebanyak 39,1 % responden menyatakan sangat setuju terdapat suatu kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen untuk memenuhi tujuan laporan keuangan di dalam perusahaan.

4.3.1.5. Terdapatnya penilaian efektifitas rancangan dan operasi SPI secara periodik oleh manajemen untuk melihat apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan (SPI5).

Hasil tanggapan responden untuk butir kuesioner variabel Sistem Pengendalian Intern dengan indikator pemantauan ditunjukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel 4.5
Pernyataan Sistem Pengendalian Internal 5
SPI5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	23	25,0	25,0	25,0
4	39	42,4	42,4	67,4
5	30	32,6	32,6	100,0
Total	92	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Dari tabel 4.5 diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebesar 25 % responden ragu-ragu bahwa terdapatnya penilaian efektifitas rancangan dan operasi SPI secara periodik oleh manajemen untuk melihat apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan; 42,4 % responden menyatakan setuju terdapatnya penilaian efektifitas rancangan dan operasi SPI secara periodik oleh manajemen untuk melihat apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan; dan sebanyak 32,6 % responden menyatakan sangat setuju terdapatnya penilaian efektifitas rancangan dan operasi SPI secara periodik oleh manajemen untuk melihat apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan.

4.3.2. Variabel Audit Kinerja

4.3.2.1. Aktivitas/kegiatan perusahaan dapat terlaksana sesuai dengan anggaran biaya yang sudah direncanakan dan hasil serta biaya yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan (AK1).

Hasil tanggapan responden untuk butir kuesioner variabel Audit Kinerja dengan indikator nilai ekonomis ditunjukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel 4.6
Pernyataan Audit Kinerja 1
AK6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	24	26,1	26,1	26,1
4	33	35,9	35,9	62,0
5	35	38,0	38,0	100,0
Total	92	100,0	100,0	

Sumber: Hasila Olahan SPSS

Dari tabel 4.6 diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebesar 26,1 % responden ragu-ragu bahwa aktivitas/kegiatan perusahaan dapat terlaksana sesuai dengan anggaran biaya yang sudah direncanakan dan hasil serta biaya yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan; 35,9 % responden menyatakan setuju bahwa aktivitas/kegiatan perusahaan dapat terlaksana sesuai dengan anggaran biaya yang sudah direncanakan dan hasil serta biaya yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan; dan sebanyak 38 % responden menyatakan sangat setuju bahwa aktivitas/kegiatan perusahaan dapat terlaksana sesuai dengan anggaran biaya yang sudah direncanakan dan hasil serta biaya yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan.

4.3.2.2. Aktivitas/kegiatan perusahaan dapat dilaksanakan dengan cara yang terbaik tanpa memerlukan tambahan biaya (AK2).

Hasil tanggapan responden untuk butir kuesioner variabel Audit Kinerja dengan indikator nilai efisiensi ditunjukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 4.7
Pernyataan Audit Kinerja 2

AK7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	19	20,7	20,7	20,7
4	35	38,0	38,0	58,7
5	38	41,3	41,3	100,0
Total	92	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Dari tabel 4.7 diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebesar 20,7 % responden ragu-ragu aktivitas/kegiatan perusahaan dapat dilaksanakan dengan cara yang terbaik tanpa memerlukan tambahan biaya; 38 % responden menyatakan setuju bahwa aktivitas/kegiatan perusahaan dapat dilaksanakan dengan cara yang terbaik tanpa memerlukan tambahan biaya; dan sebanyak 41,3 % responden menyatakan sangat setuju bahwa aktivitas/kegiatan perusahaan dapat dilaksanakan dengan cara yang terbaik tanpa memerlukan tambahan biaya.

4.3.2.3. Pelaksanaan suatu aktivitas/kegiatan perusahaan berhasil mencapai sasaran yang diinginkan (AK3).

Hasil tanggapan responden untuk butir kuesioner variabel Audit Kinerja dengan indikator nilai efektifitas ditunjukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 4.8
Pernyataan Audit Kinerja 3
AK8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	15	16,3	16,3	16,3
4	40	43,5	43,5	59,8
5	37	40,2	40,2	100,0
Total	92	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Dari tabel 4.8 diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebesar 16,3 % responden ragu-ragu bahwa pelaksanaan suatu aktivitas/kegiatan perusahaan berhasil mencapai sasaran yang diinginkan; 43,5 % responden menyatakan setuju bahwa bahwa pelaksanaan suatu aktivitas/kegiatan perusahaan berhasil mencapai sasaran yang diinginkan; dan sebanyak 40,2 % responden menyatakan sangat setuju bahwa pelaksanaan suatu aktivitas/kegiatan perusahaan berhasil mencapai sasaran yang diinginkan.

4.3.3. Variabel *Good Corporate Governance*

4.3.3.1. Dalam proses pengambilan keputusan , perusahaan memiliki keterbukaan/transparansi dalam mengemukakan informasi yang relevan kepada karyawan (GCG1).

Hasil tanggapan responden untuk butir kuesioner variabel *Good Corporate Governance (GCG)* dengan indikator transparansi ditunjukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 4.9
Pernyataan Good Corporate Governance 1
GCG9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	17	18,5	18,5	18,5
4	37	40,2	40,2	58,7
5	38	41,3	41,3	100,0
Total	92	100,0	100,0	

Sumber: Hasila Olahan SPSS

Dari tabel 4.9 diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebesar 18,5 % responden ragu-ragu bahwa dalam proses pengambilan keputusan , perusahaan memiliki keterbukaan/transparansi dalam mengemukakan informasi yang relevan kepada karyawan; 40,2 % responden menyatakan setuju bahwa dalam proses pengambilan keputusan , perusahaan memiliki keterbukaan/transparansi dalam mengemukakan informasi yang relevan kepada karyawan; dan sebanyak 41,3 % responden menyatakan sangat setuju bahwa dalam proses pengambilan keputusan , perusahaan memiliki keterbukaan/transparansi dalam mengemukakan informasi yang relevan kepada karyawan.

4.3.3.2. Perusahaan dikelola secara professional sesuai dengan prinsip korporat yang sehat tanpa adanya benturan kepentingan pribadi maupun golongan atau dari pihak manapun juga (GCG2).

Hasil tanggapan responden untuk butir kuesioner variabel *Good Corporate Governance (GCG)* dengan indikator kemandirian ditunjukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 4.10
Pernyataan *Good Corporate Governance 2*
GCG10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	13	14,1	14,1	14,1
4	43	46,7	46,7	60,9
5	36	39,1	39,1	100,0
Total	92	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Dari tabel 4.10 diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebesar 14,1 % responden ragu-ragu bahwa perusahaan dikelola secara professional sesuai dengan prinsip korporat yang sehat tanpa adanya benturan kepentingan pribadi maupun golongan atau dari pihak manapun juga; 46,7 % responden menyatakan setuju bahwa perusahaan dikelola secara professional sesuai dengan prinsip korporat yang sehat tanpa adanya benturan kepentingan pribadi maupun golongan atau dari pihak manapun juga; dan sebanyak 39,1 % responden menyatakan sangat setuju bahwa perusahaan dikelola secara professional sesuai dengan prinsip korporat yang sehat tanpa adanya benturan kepentingan pribadi maupun golongan atau dari pihak manapun juga.

4.3.3.3. Terdapatnya kejelasan fungsi pelaksanaan pekerjaan dan tanggungjawab di dalam perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan berjalan dengan efektif (GCG3).

Hasil tanggapan responden untuk butir kuesioner variabel *Good Corporate Governance (GCG)* dengan indikator akuntabilitas ditunjukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 4.11
Pernyataan *Good Corporate Governance 3*
GCG11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	10	10,9	10,9	10,9
4	42	45,7	45,7	56,5
5	40	43,5	43,5	100,0
Total	92	100,0	100,0	

Sumber: Hasila Olahan SPSS

Dari tabel 4.11 diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebesar 10,9 % responden ragu-ragu bahwa terdapatnya kejelasan fungsi pelaksanaan pekerjaan dan tanggungjawab di dalam perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan berjalan dengan efektif; 45,7 % responden menyatakan setuju bahwa terdapatnya kejelasan fungsi pelaksanaan pekerjaan dan tanggungjawab di dalam perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan berjalan dengan efektif; dan sebanyak 43,5 % responden menyatakan sangat setuju bahwa terdapatnya kejelasan fungsi pelaksanaan pekerjaan dan tanggungjawab di dalam perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan berjalan dengan efektif.

4.3.3.4. Pengelolaan perusahaan sesuai dengan UU atau peraturan yang berlaku (GCG4).

Hasil tanggapan responden untuk butir kuesioner variabel *Good Corporate Governance (GCG)* dengan indikator pertanggung jawaban ditunjukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 4.12
Pernyataan Good Corporate Governance 4

GCG12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	14	15,2	15,2	15,2
	4	47	51,1	51,1	66,3
	5	31	33,7	33,7	100,0
Total		92	100,0	100,0	

Sumber: Hasila Olahan SPSS

Dari tabel 4.12 diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebesar 15,2 % responden ragu-ragu bahwa pengelolaan perusahaan sesuai dengan UU atau peraturan yang berlaku; 51,1 % responden menyatakan setuju bahwa pengelolaan perusahaan sesuai dengan UU atau peraturan yang berlaku; dan sebanyak 33,7 % responden menyatakan sangat setuju pengelolaan perusahaan sesuai dengan UU atau peraturan yang berlaku.

4.3.3.5. Terdapatnya kewajaran di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (GCG5).

Hasil tanggapan responden untuk butir kuesioner variabel *Good Corporate Governance (GCG)* dengan indikator kewajaran ditunjukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 4.13
Pernyataan Good Corporate Governance 5

GCG13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	15	16,3	16,3	16,3
	4	44	47,8	47,8	64,1
	5	33	35,9	35,9	100,0
Total		92	100,0	100,0	

Sumber: Hasila Olahan SPSS

Dari tabel 4.13 diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebesar 16,3 % responden ragu-ragu bahwa terdapatnya kewajaran di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 47,8 % responden menyatakan setuju bahwa terdapatnya kewajaran di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan sebanyak 35,9 % responden menyatakan sangat setuju terdapatnya kewajaran di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4.4. Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini mencerminkan tingkat keandalan dan validitas tinggi. Bagian berikutnya akan dipaparkan mengenai hasil pengujian validitas dan reliabilitas.

4.4.1. Hasil Pengujian Validitas

Pengujian validitas dilakukan melalui faktor analisis dengan menggunakan *factor loading*. Pengukuran faktor analisis selanjutnya dilakukan dengan menggunakan bantuan *software* SPSS 11.5 for Windows. Indikator masing-masing konstruk yang memiliki *factor loading* yang signifikan membuktikan bahwa indikator-indikator tersebut merupakan satu kesatuan alat ukur yang mengukur konstruk yang sama dan dapat memprediksi dengan baik konstruk yang seharusnya diprediksi (Hair *et al.*, 1998). Kriteria terhadap signifikansi *factor loading* adalah *factor loading* > 0,3 adalah signifikan, *factor loading* > 0,4 lebih signifikan, dan *factor loading* yang > 0,5 adalah sangat signifikan. Tabel 4.14 akan

ditunjukkan mengenai hasil pengujian validitas.

Tabel 4.14
Analisis Faktor Loading Awal (0.4)

Rotated Component Matrix

	Component		
	1	2	3
SPI1	,767		
SPI2	,790		
SPI3	,874		
SPI4	,863		
SPI5		,500	
AK6			,881
AK7			,576
AK8			,786
GCG9		,539	
GCG10		,623	
GCG11		,731	
GCG12		,757	
GCG13		,598	

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 5 iterations.

Sumber: Hasil Olahan SPSS

SPI:Sistem Pengendalian Internal; AK:Audit Kinerja; GCG:Good Corporate Governance

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa satu item dinyatakan tidak valid pada factor loading 0.4. Item yang dinyatakan tidak valid adalah item kelima dari Sistem Pengendalian Intern (SPI5). Item tersebut dinyatakan tidak valid karena data pada item tersebut bersifat ambigu. Untuk menghilangkan data ambigu, pengujian validitas dilakukan kembali dengan factor loading sebesar 0.4. Tabel berikut akan ditunjukkan hasil pengujian validitas kedua.

Tabel 4.15
Analisis Faktor Loading AKhir 0.4

Rotated Component Matrix

	Component		
	1	2	3
SPI1	,760		
SPI2	,795		
SPI3	,877		
SPI4	,859		
AK6			,879
AK7			,552
AK8			,810
GCG9		,551	
GCG10		,662	
GCG11		,748	
GCG12		,732	
GCG13		,617	

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
 a. Rotation converged in 5 iterations.

Sumber: Hasil Olahan SPSS
 SPI:Sistem Pengendalian Internal; AK:Audit Kinerja; GCG: *Good Corporate Governance*

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian dinyatakan valid pada factor loading 0.4, dengan demikian jumlah item yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut adalah empat item dari struktur pengendalian intern, tiga item dari audit kinerja dan lima item dari *good corporate governance*. Selanjutnya item – item yang dinyatakan valid tersebut akan diuji tingkat reliabilitasnya.

4.4.2. Hasil Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi terhadap instrumen-instrumen yang mengukur konsep dan membantu untuk mengetahui kebaikan alat ukur (Sekaran, 2000). Konsistensi internal butir-butir pernyataan dalam kuesioner akan diuji dengan menggunakan *Cronbach's Alpha*. Nilai *rule of thumb* yang akan digunakan dalam *Cronbach's Alpha* adalah harus lebih besar dari 0,7, meskipun nilai 0,6 juga masih dapat

diterima (Hair *et al.*, 1998).

Tabel 4.16
Hasil Uji Reliabilitas Struktur Pengendalian Internal

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,857	,857	4

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Tabel 4.17
Hasil Uji Reliabilitas Audit Kinerja

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,687	,690	3

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Tabel 4.18
Hasil Uji Reliabilitas *Good Corporate Governance*

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,711	,713	5

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan pada Tabel 4.16, 4.17 dan 4.18 di atas, seluruh konstruk penelitian telah memenuhi kriteria koefisien *Cronbach's Alpha* ≥ 0.6 , yaitu struktur pengendalian intern, audit kinerja dan *good corporate governance*. Dengan demikian, seluruh instrumen yang

memiliki reliabilitas dan validitas baik adalah 12 item. Jumlah item-item tersebut layak untuk dianalisis lebih lanjut.

4.4.3. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Suatu uji persamaan regresi linier dapat dikatakan baik untuk menggambarkan hubungan fungsional sekelompok variabel bebas terhadap variabel tidak bebas jika persamaan tersebut memenuhi asumsi-asumsi regresi klasik. Asumsi regresi yang dilihat dan diuji dalam penelitian ini adalah asumsi error mengikuti distribusi normal dan asumsi bebas multikoleniaritas.

4.4.3.1. Hasil Pengujian Multikolonieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel – variabel ini bersifat tidak ortogonal. Pada penelitian ini digunakan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* sebagai indikator ada tidaknya multikolonieritas diantara variabel bebas. Nilai *cutoff* yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai *VIF* > 10.

Tabel 4.19
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2,669	,430		6,207	,000		
tak	,177	,080	,223	2,222	,029	,967	1,035
tspi	,197	,080	,248	2,465	,016	,967	1,035

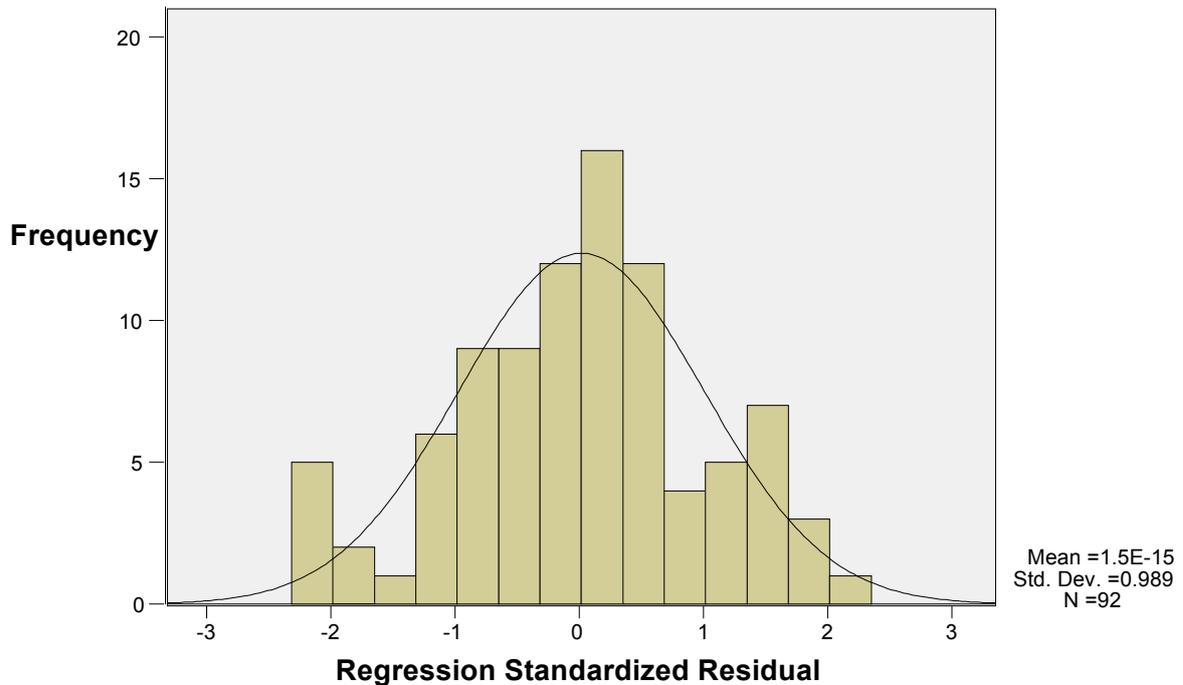
a. Dependent Variable: tgcg

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Melihat hasil besaran dari nilai $VIF < 10$ dan $tolerance$ diatas 0.10 yang terlihat dari tabel 4.19 di atas, menunjukkan bahwa dalam penelitian tidak terdapat multikolonieritas. Hal ini menyimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

4.4.3.2. Hasil Pengujian Normalitas

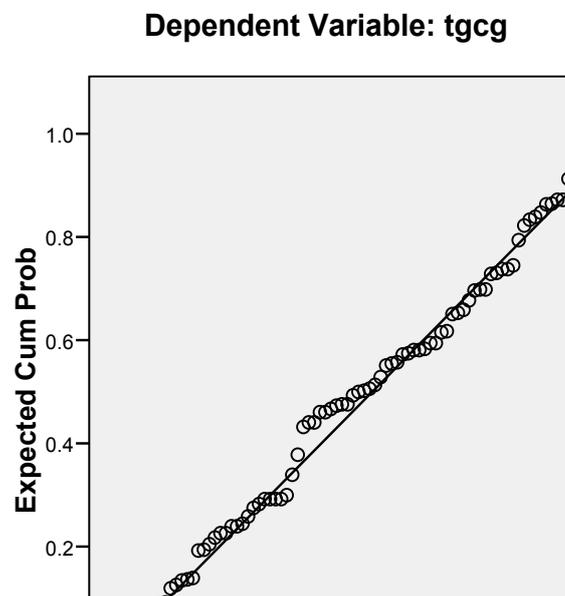
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.



Sumber: Hasil Olahan SPSS

Gambar.4.1
Bagan Chart Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized



Gambar.4.2
Grafik Histogram Hasil Uji Normalitas

Dari gambar 4.1 dan 4.2 diatas terlihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

4.5. Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan

4.5.1. Peranan Sistem Pengendalian Internal dalam Pencapaian *Good Corporate Governance*.

Tabel 4.20

Hasil Pengujian Model 1

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,698	1	1,698	8,173	,005 ^a
	Residual	18,696	90	,208		
	Total	20,394	91			

a. Predictors: (Constant), tspi

b. Dependent Variable: tgcg

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Dari uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 8.173 dengan probabilitas 0.005. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk memrediksi Sistem Pengendalian Intern berperan dalam pencapaian *Good Corporate Governance (GCG)*.

Tabel 4.21

**Hasil Pengujian Hipotesis 1
(Peranan SPI dalam Pencapaian GCG)**

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,277	,339		9,660	,000
	tspi	,230	,080	,289		

a. Dependent Variable: tgcg

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Terlihat dari tabel 4.21, probabilitas signifikansi variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebesar 0.005 lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel SPI

berperan secara positif terhadap pencapaian *good corporate governance (GCG)* pada perusahaan.

4.5.2. Peranan Audit Kinerja dalam Pencapaian *Good Corporate Governance*

Tabel 4.22
Hasil Pengujian Model 2

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,471	1	1,471	6,998	,010 ^a
	Residual	18,923	90	,210		
	Total	20,394	91			

a. Predictors: (Constant), tak

b. Dependent Variable: tgcg

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Dari uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 6.998 dengan probabilitas 0.01. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk memrediksi Audit Kinerja berperan dalam pencapaian *Good Corporate Governance (GCG)*.

Tabel 4.23
Hasil Pengujian Hipotesis
(Peranan AK dalam Pencapaian GCG)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,343	,341		9,793	,000
	tak	,213	,081	,269	2,645	,010

a. Dependent Variable: tgcg

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Terlihat dari tabel 4.23, probabilitas signifikansi variabel Audit Kinerja sebesar 0.010 lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Audit Kinerja berperan secara positif dalam pencapaian *good corporate governance (GCG)* pada perusahaan.

4.5.3. Peranan Sistem Pengendalian Internal dan Audit Kinerja dalam Pencapaian Good Corporate Governance.

Tabel 4.24
Hasil Pengujian Model 3

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,681	2	1,341	6,735	,002 ^a
	Residual	17,713	89	,199		
	Total	20,394	91			

a. Predictors: (Constant), tspi, tak

b. Dependent Variable: tgcg

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Dari uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 6.735 dengan probabilitas 0.002. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk memrediksi Sistem Pengendalian Intern dan Audit Kinerja berperan dalam pencapaian *Good Corporate Governance (GCG)*.

Tabel 4.25
Hasil Pengujian Hipotesis
(Peranan SPI dan AK dalam Pencapaian GCG)

Coefficients^a

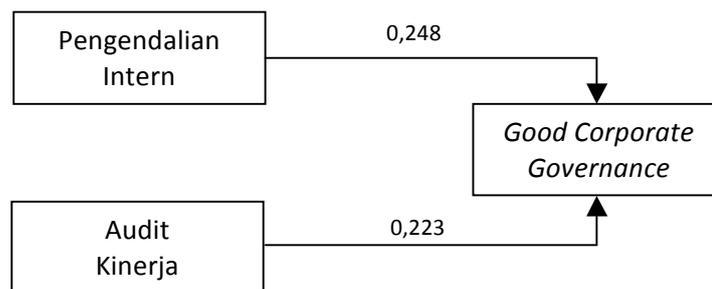
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,669	,430		6,207	,000
	tak	,177	,080	,223	2,222	,029
	tspi	,197	,080	,248	2,465	,016

a. Dependent Variable: tgcg

Sumber: Hasil Olahan SPSS

Terlihat dari tabel 4.25, probabilitas signifikansi variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Audit Kinerja secara simultan sebesar 0.029 dan 0.016 lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel SPI dan Audit Kinerja secara simultan berperan secara positif dalam pencapaian *good corporate governance (GCG)* pada perusahaan.

4.6. Model Penelitian Hasil Analisis Regresi secara Simultan



Gambar 4.2
Model Hasil Penelitian

BAB V

SIMPULAN

Bab ini membahas mengenai simpulan berdasarkan pada hasil analisis data. Pada bab ini pula peneliti akan menyajikan keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian mendatang.

5.1. Simpulan

Dari hasil penelitian mengenai Peranan Sistem Pengendalian Intern dan Audit Kinerja dalam Pencapaian *Good Corporate Governance* pada Perusahaan BUMN, menunjukkan bahwa :

- 1 Sistem Pengendalian Intern (SPI) berperan secara positif dalam pencapaian *Good Corporate Governance (GCG)* pada Perusahaan BUMN.

Sistem pengendalian internal perusahaan yang merupakan salah satu perwujudan dari *GCG*, diimplementasikan secara konsisten di dalam perusahaan karena dengan menerapkan *GCG* diperlukan keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban perusahaan dengan pihak luar. Peran pengendalian internal di dalam perusahaan dapat menjadi alat bagi manajemen untuk mengawasi jalannya perusahaan agar operasi perusahaan berjalan dengan lancar, aktiva perusahaan dapat terjamin keamanannya dan dapat mencegah kecurangan, kesalahan dan pemborosan. Selain daripada itu, sistem pengendalian intern dalam perusahaan BUMN ini dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan eksistensi dan pertanggungjawaban perusahaan dengan pihak luar.

2 Audit Kinerja berperan secara positif dalam pencapaian *Good Corporate Governance (GCG)* pada Perusahaan BUMN.

Dengan dilakukannya audit kinerja yang baik di dalam perusahaan, perusahaan dapat mengetahui strategi usaha yang dijalankan. Audit kinerja yang sudah ada di dalam perusahaan dapat menjadi sinyal awal sehingga apabila ditemukan faktor-faktor yang menjadi kendala kinerja perusahaan dapat dilakukan tindakan seperlunya pada tingkat yang lebih awal. Sementara itu pelaksanaan audit dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya, setiap jajaran yang ada dalam perusahaan perlu mengetahui proses audit sehingga tercapainya suatu kinerja yang baik. Apabila audit kinerja ini dilakukan secara baik dan benar maka audit kinerja ini secara potensial dapat menjadi alat evaluasi yang sangat berguna. Audit kinerja di dalam perusahaan dapat bermanfaat untuk membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta memberikan informasi yang bermutu, tepat waktu untuk pengambilan keputusan, dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yaitu efisiensi dan efektivitas operasi.

3 Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Audit Kinerja berperan secara positif dalam pencapaian *Good Corporate Governance (GCG)* pada Perusahaan BUMN

Pencapaian tujuan BUMN berupa kinerja perusahaan secara maksimal diperlukannya pengelolaan perusahaan dengan baik. Pengelolaan perusahaan dengan baik pada arti luas diistilahkan dengan *good corporate governance (GCG)*. Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa pencapaian *GCG* didukung oleh pembangunan berbagai aspek yang mendukungnya antara lain pengendalian intern. Berbicara tentang pengendalian intern organisasi tidak dapat dilepaskan dengan audit kinerja. Untuk mencapai *good corporate governance (GCG)* secara efektif diperlukan audit kinerja dengan tugas mengevaluasi dan

meningkatkan keefektivan manajemen resiko, pengendalian dan proses pengaturan serta pengelolaan organisasi. Semakin ekonomis, efisiensi dan efektif suatu perusahaan dan didukung oleh adanya sistem pengendalian intern yang dikelola dengan baik maka pencapaian GCG dapat terwujud dengan baik.

5.2. Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Mendatang.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu pertama, penelitian ini hanya melibatkan satu jenis BUMN beserta anak perusahaan yang masih dalam satu perusahaan. Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu penelitian dapat dilakukan dengan objek peneliti dari beberapa perusahaan BUMN yang berbeda; kedua, karena adanya beberapa kepentingan yang tidak dapat diganggu dari setiap responden yang mengisi kuesioner tersebut maka peneliti mendistribusikan kuesioner dengan sistem *dropping* (tidak langsung bertatap muka dengan responden langsung) sehingga peneliti tidak dapat menjamin 100% pengisian dan distribusi kuesioner berjalan dengan baik, merata dan semestinya. Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu pada saat pendistribusian kuesioner dapat secara langsung bertatap muka dengan responden sehingga peneliti selanjutnya dapat yakin betul pengisian dan pendistribusian kuesioner dapat berjalan dan diisi dengan memadai.

Daftar Pustaka

- Arens, Alvin.A. and James K.Loebbeck. 2000. *Auditing: An Integrated Approach*. New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
- Arens, Alvin.A. et.al. 2006. *Auditing And Assurance Services. An Intergrated Approach*. 11th Edition. Pearson Prentice Hall.
- Arter, Denis.R. 1997. *Management Auditing: A Result-Oriented Audit can Provide the Impetus for Positive Change*. Quality Digest.
- Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Batra and Picket.H.K.1997. *The Internal Auditing*. Third Edition. John Willey and Sons,Inc.
- Burrowers, Ashley and Perrson, Marie. 2000. *The Swedish Management Audit: A Precedent for Performance and Value for Money Audits*. Management Auditing Journal. Vol 15.
- Cangemi, Michael.P. and Tommie Singelton. 2003. *Managing The Audit Fuction: A Corporate Audit Department Procedures Guide*. John Wiley and Sons,Inc.
- Carpenter, Gina.M. 2004. *Good Corporate Governance Responding To Today's New Business Environment*. Management Quarterly. Vol.45. No.1.
- COSO. 1992. *Internal Control-Integrated Framework*. Committee of Sponsoring Organization Of The Tread Way Commission.
- Effendi, Arief.Muh. 2009. Transformasi Organisasi: Sebuah Pemikiran untuk “*Better Corporate Governance*” di Indonesia. Akademi Manajemen Indonesia. Guna Widya: Hal. 337-352.
- Gaffar. 2007. Audit Kinerja Sebagai Alat Untuk Menilai Efisiensi dan Efektifitas Suatu Perusahaan. Jurnal Ichsan Gorontalo. Vol.2, No.3 Agustus-Oktober.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro
- Gujarati and Damodar, N. 2003. *Basic Econometrics*. 4rd Edition. New York: McGraw-Hill Inc.

- Gunarsih, Tri dan Darmawanti. 2003. Hubungan *Good Corporate Governance* dan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol.9.No.7.
- Hair, J. R., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. 1998. *Multivariate Data Analysis*. 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, Inc.
- Ikatan Akuntan Indonesia-KAP. 2001. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Kartamulja, Rodi.A. 2001. Peranan Audit Kinerja Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Bandung *Urban Development Project*. JAAI. Vol.5. No.2 Desember.
- Kementrian BUMN. Direktori BUMN. Melalui (<http://www.eis.bumn-ri.go.id/direktori.htm>)
- _____. 4 Juni 2002. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Nomor: Kep-100/MBU/2002. Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- _____.2002. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Nomor: Kep-117/M-MBU/2002. Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Majidah, Nur. Dewi dan Dolok Hutagalung. 2004. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dan Sumber Keunggulan terhadap Kinerja Keuangan: Suatu Analisis Terhadap BUMN di Indonesia. Universitas Padjadjaran Bandung.
- Midjan,La dan Azhar Susanto. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Lingga Jaya.
- Mulyadi, dan Kanaka Puradiredja. 2001. Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi, dan Kanaka Puradiredja. 2002. Auditing. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat
- Nogi, Hessel.S. 2003. Manajemen Keuangan bagi Analisis Kredit Perbankan Mengelola Kredit Berbasis *Good Corporate Governance*. Yogyakarta:Balairung.
- Pratolo, Suryo. 2007. *Good Corporate Governance* dan Kinerja BUMN di Indonesia: Aspek Audit Manajemen dan Pengendalian Intern sebagai Variabel Eksogen serta Tinjauannya pada Jenis Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Rochaety,Ety.,Ratih Tresnanti., H.Abdul Madjid Latief. 2007. Metodologi Penelitian Bisnis: Dengan Aplikasi SPSS. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ruin, Josef Eby.2003. *Audit Committee: Going Forward Towards Corporate Governance*. Malaysian Institute of Corporate Governance (MICG).

- Tjager,I Nyoman et.al. 2003. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta:Prenhalindo.
- Tjahyadi, R. A. 2007. Pengaruh Kepuasan Pelanggan, Komitmen Multidimensional pada Repurchase Intention dan Advocacy Intention. *Tesis S2 Program PascaSarjana Magister Sain Universitas Gadjah Mada* (Tidak Dipublikasikan).
- Sawyer, Lawrence.B., Dittenhover, Mortimer.A. 2003. *Sawyer's Internal Auditing*. Florida: The Institute of Internal Auditors.
- Sekaran, U. 2000. *Research Methods for Business*. 2nd ed. New York: John Willey & Sons.
- Siagian, P.Sondang. 2001. *Audit Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siswanto Sutoyo dan John Aldridge.E. 2005, *Good Corporate Governance:Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka.
- Soegiharto. 2005. Peran Akuntan dalam Menegakkan *Good Corporate Governance*. Auditor. No.18
- Strawser,Jerry R and Robert H.Strawser. 2001. *Auditing: Theory and Practice*. Desktop Publishing: Sherlyl New.
- Swasembada. 2004. Edisi 04/XX/ 19 Februari- 3 Maret.
- Swasembada. 2005. Edisi 09/XXI/28 April – 11 Mei.
- Swasembada. 2006. Edisi 26/ XXII/ 11 – 20 Desember.
- Swasembada. 2007. Edisi 30/XXIII/15 – 24 Desember.
- Tim Corporate Governance BPKP.2003. *Dasar- Dasar Corporate Governance*. Jakarta: Penerbit BPKP
- Warsono, Sony., Fitri Amalia., Dian Kartika. 2009. *Corporate Governance Concept and Model*. Yogyakarta: Centre for Good Corporate Governance.